

ANALISIS SEJARAH PASCA KEMERDEKAAN DALAM PEMBENTUKAN IDENTITAS NASIONAL

Febry Novi^{a,1*}, Istianingsih^{b,2}, Mahadika Bagas Karliawan^{c,3}, Nurruifah Ramadhini^{d,4}, Sulastri^{e,5},
Universitas Pamulang

¹febrynovi9@gmail.com ; ²thiasulaiman22@gmail.com ; ³mahadikabagas17@gmail.com ;
⁴dinirrd@gmail.com ; ⁵dosen02081@unpam.ac.id

Naskah diterima: 16-12-2023, direvisi: 17-12-2023, disetujui: 30-12-2023

ABSTRAK

Jurnal ini menganalisis peran dari sejarah pasca kemerdekaan Indonesia dalam pembentukan identitas nasional. Setelah memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memiliki banyak tantangan untuk mempertahankan kemerdekaan juga identitas nasional. Dari agresi militer hingga G30SPKI, Indonesia tetap berusaha mempertahankan kemerdekaan dengan berbagai cara. Metode penelitian menggunakan literatur review yang menggunakan buku dan jurnal sebagai referensi yang ada. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memaparkan hal yang lebih mendalam tentang bagaimana sejarah pasca-kemerdekaan berperan dalam membentuk dan menguatkan identitas nasional Indonesia hingga saat ini.

Kata-kata kunci: Sejarah Pasca-Kemerdekaan, Identitas Nasional, Pancasila

Pendahuluan

Sejak zaman dahulu, bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku, bahasa, budaya, dan agama yang disatukan oleh Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Identitas nasional Indonesia yang pluralistik ini mencakup Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 sebagai identitas instrumental, Garuda sebagai lambang negara, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan lagu kebangsaan "Indonesia Raya." Namun, di era modern yang serba berbasis teknologi, semangat nasionalisme mulai memudar akibat pengaruh globalisasi. Meskipun globalisasi membawa banyak dampak positif, dampak negatifnya sulit disaring dan secara perlahan dapat mengikis identitas nasional.

Pengaruh globalisasi memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap identitas nasional, terutama jika tidak dikelola dengan baik. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa sebagai bukti bahwa manusia memerlukan hubungan sosial dan kerja sama dengan sesama manusia. Interaksi sosial ini terjadi karena adanya kebutuhan, dan dalam mencapai tujuan bersama, manusia membutuhkan kebersamaan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti "berbeda-beda tetapi tetap satu," mencerminkan keberagaman yang membentuk bangsa Indonesia, termasuk dalam hal agama. Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 22 ayat 2 UU HAM menegaskan bahwa negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing.

UUD 1945 versi amandemen, Pasal 31 ayat 3, menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Pendidikan ini bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan peradaban manusia. Pasal 31 ayat 5 menambahkan bahwa pemerintah juga memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi individu yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, dan bertanggung jawab. Pendidikan nasional berakar pada Pancasila, UUD 1945, serta nilai-nilai agama dan budaya bangsa.

Bangsa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa karena terdiri dari berbagai suku. Meskipun ada perbedaan suku, bangsa Indonesia tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bersama, sehingga perbedaan tersebut tidak memecah belah bangsa. Sebagai negara yang kaya akan budaya, sumber daya alam, dan sumber daya manusia, Indonesia memiliki identitas yang unik. Identitas ini merupakan ciri khas yang membedakan Indonesia dari bangsa lain. Jika Indonesia tidak memiliki identitas, negara-negara lain akan berusaha merebutnya, seperti yang terjadi pada masa penjajahan. Dahulu, ketika Nusantara belum bersatu dan hanya berorientasi pada kepentingan kelompok, Indonesia menjadi sasaran penjajah. Kini, Indonesia telah memiliki identitas yang diakui secara internasional, seperti nama negara Indonesia, bendera merah-putih, lagu kebangsaan "Indonesia Raya", dan ideologi Pancasila, serta identitas lainnya yang unik bagi Indonesia.

Kebudayaan bangsa Indonesia merupakan bagian penting dari identitas yang sangat berharga. Ketika seorang presiden melakukan kunjungan ke negara lain, ia membawa identitas bangsa Indonesia. Demikian pula, ketika pemimpin negara lain berkunjung ke Indonesia, mereka membawa identitas negara masing-masing. Di era globalisasi saat ini, kesadaran akan pentingnya identitas nasional perlu terus dikembangkan, karena semakin banyak masyarakat yang kurang menyadari pentingnya identitas nasional bagi kelangsungan bangsa. Maka dari latar belakang yang telah dipaparkan, berikut adalah beberapa rumusan masalah; Bagaimana sejarah Indonesia pasca kemerdekaan dapat membentuk identitas nasional?, dan faktor – faktor apa saja dalam sejarah pasca kemerdekaan dalam membentuk identitas nasional Indonesia ?.

Metode

Pada jurnal ini, menggunakan metode literatur review. Dimana metode ini menggunakan jurnal – jurnal dan buku sebagai refrensi utamanya. Serta sumber data yang kami gunakan dan kami ambil berasal dari serupa yaitu jurnal-jurnal dan buku.

Hasil dan Pembahasan

Indonesia belum memperoleh kemerdekaan setelah Jepang menyerah kepada Sekutu sebagai musuh sehingga pihak golongan muda memanfaatkan kekosongan tersebut dan mendesak Ir. Soekarno untuk memproklamkan kemerdekaan Indonesia.

Radio dan surat kabar merupakan sumber informasi utama mengenai peristiwa kemerdekaan Indonesia pada saat itu.

Rakyat Indonesia menerima Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada waktu yang berbeda. Semangat juang dan patriotisme memberi keberanian bagi Indonesia untuk berjuang agar menjadi negara yang

merdeka. Selain semangat juang Indonesia yang kuat, masyarakat mendapatkan pengalaman pendidikan dan militer pada masa penjajahan Jepang.

Jepang membagikan pengalaman bagi Indonesia untuk berbagai tujuan.

Dalam program pelatihan militer, Jepang ingin memanfaatkan orang Indonesia sebagai tentara Jepang dihadapan sekutu.

Selama Perang Asia Timur Raya, sekitar 2 juta anak muda Indonesia mengenyam pendidikan militer seperti Seinendan, Keibodan, Heiho, Peta, dll.

Pendidikan militer ini bermanfaat karena meningkatkan rasa percaya diri untuk melindungi harga diri dan juga melindungi negara. Maka dari itu penjajahan yang terjadi di Indonesia memunculkan banyak kerugian bagi Nusantara, tetapi pada sisi lain hal tersebut merupakan salah satu faktor internal bersatunya dan awal dari tonggak persatuan Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung satu darah, satu bahasa, dan satu negara yaitu Negara Indonesia. Serta juga penjajahan Jepang di Indonesia juga membangun sumber daya manusia masyarakat Indonesia, yang dimana telah dijelaskan diatas pelatihan militer yang dilakukan oleh tentara jepang kepada sejumlah masyarakat Indonesia untuk membantu tentara Jepang dalam perang dunia ke II yang dimana Jepang melawan sekutu, yang pada saat itu tentara Jepang, Italia, dan Jerman sedang dalam keadaan terdesak. Maka dari itu Jepang membuat kebijakan untuk melatih Rakyat Indonesia untuk membantu dalam medan perang dan keamanan serta kelanggengan kekuasaan penjajahan Jepang di Nusantara. Akan tetapi tidak lama setelah itu segera datang kekalahan Jepang setelah dijatuhi bom atom oleh sekutu pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan Nagasaki, yang membuat Penjajahan Jepang di Indonesia melemah dan meningkatkan semangat persatuan golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Dimana golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Golongan tua diculik oleh golongan muda ke Rengasdengklok sehingga dikenal sebagai peristiwa Rengasdengklok.

Peristiwa tersebut menjadi tonggak kebangkitan dan kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 17 Agustus 1945 dan diproklamasikan oleh Ir. Soekarno yang dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur no. 56, Jakarta Pusat.

Jepang sebagai negara yang menjanjikan kemerdekaan pun tidak menyangkal ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 digelar sidang PPKI yang dilaksanakan di Gedung Pancasila. Sidang PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, membentuk Komite Nasional Indonesia pusat yang bertugas untuk membantu Presiden dalam membantu tugas-tugas kenegaraan, menetapkan sistem pemerintahan presidensial yang memilih Soekarno sebagai Presiden pertama Indonesia dan juga Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.

Setelah proklamasi kemerdekaan dan juga penetapan Konstitusi, Indonesia juga mengalami serangan eksternal dari Belanda yang tetap berusaha untuk mengambil alih kembali Indonesia melalui Agresi Militer.

Agresi Militer Belanda I, yang dikenal juga sebagai Operasi Produk (*Operatie Product*), adalah peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan. Agresi ini berlangsung di wilayah Jawa dan Sumatra dari 21 Juli hingga 5 Agustus 1947. Tujuan utama dari operasi militer ini adalah merebut kembali kawasan-kawasan perkebunan penghasil rempah-rempah, yang menjadi sumber keuntungan besar bagi Belanda. Sebelumnya, hasil bumi dari Indonesia telah diperdagangkan secara internasional dan menjadi penopang utama perekonomian Kerajaan Belanda. Namun, kemerdekaan Indonesia mengancam sumber pendapatan tersebut, sehingga mendorong Belanda untuk melancarkan operasi ini.

Serangan difokuskan pada tiga wilayah strategis: Sumatra Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Sumatra Timur, Belanda menargetkan perkebunan tembakau; di Jawa Tengah, mereka menguasai pantai utara; sedangkan di Jawa Timur, mereka menasar perkebunan tebu dan pabrik gula. Istilah Operasi Produk diperkenalkan oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mook, yang menolak mengakui Perjanjian Linggarjati yang disepakati pada 25 Maret 1947. Belanda secara sepihak menafsirkan perjanjian tersebut untuk membenarkan tindakan militernya. Peristiwa ini pun menimbulkan berbagai dampak di bidang politik, ekonomi, dan sosial bagi Indonesia.

Tujuan Agresi Militer Belanda I

Belanda melancarkan agresi dengan alasan "aksi polisionil" untuk memulihkan stabilitas keamanan di Indonesia sekaligus mempertahankan interpretasi sepihak mereka terhadap Perjanjian Linggarjati. Meskipun terjadi perselisihan atas hasil perundingan Linggarjati antara Indonesia dan Belanda, pihak Belanda memanfaatkan situasi tersebut sebagai peluang untuk mencoba merebut kembali kendali atas Indonesia. Mereka terus berupaya menjadikan Indonesia sebagai negara persemakmuran di bawah Belanda sebagai negara induk. Namun, upaya ini ditolak keras oleh bangsa Indonesia yang memperjuangkan kedaulatan penuh tanpa campur tangan Belanda. Selain alasan ekonomi, Belanda juga memiliki tujuan strategis, yaitu mengepung ibu kota Republik Indonesia, merebut kedaulatan yang telah diperjuangkan dengan susah payah, dan melemahkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Serangan Belanda difokuskan pada berbagai wilayah di Jawa dan Sumatra. Meski TNI pada awalnya terpecah akibat serangan ini, mereka berhasil membangun pertahanan baru dengan menerapkan strategi perang gerilya. Strategi ini membuat gerakan Belanda menjadi terbatas hanya pada kota-kota besar dan jalan-jalan utama, sementara TNI berhasil menguasai wilayah pedalaman. Peristiwa ini mencerminkan dampak buruk dari Perjanjian Linggarjati bagi Indonesia, yang memicu serangkaian konflik lebih lanjut.

Dampak Positif bagi Indonesia

Upaya Belanda yang menyamakan agresinya sebagai "Aksi Polisionil" gagal meyakinkan dunia internasional. Tindakan ini justru mendapat kecaman luas dari berbagai negara, menyebabkan Belanda kehilangan dukungan internasional. Sebaliknya, Republik Indonesia berhasil memperoleh simpati dan dukungan dari masyarakat dunia. Pengakuan kemerdekaan Indonesia secara de jure mulai datang dari negara-negara Arab, diawali oleh Mesir pada tahun 1947, diikuti oleh Lebanon, Suriah, Irak, Afganistan, dan Arab Saudi pada tahun yang sama. Dukungan ini tidak terlepas dari peran penting Sutan Syahrir, yang mengutus delegasi yang dipimpin oleh K.H. Agus Salim ke negara-negara Islam di Timur Tengah. Pengakuan dari negara-negara Arab tersebut memperkuat posisi Indonesia dalam forum internasional.

Dampak Negatif bagi Indonesia

Di sisi lain, agresi militer Belanda I membawa dampak buruk bagi Indonesia. Kekuatan militer Indonesia berhasil ditekan oleh Belanda, sehingga Tentara Nasional Indonesia (TNI) berada dalam posisi terjepit. Belanda juga berhasil menguasai sejumlah wilayah strategis, yang mempersempit kedaulatan wilayah Indonesia. Lebih dari 150.000 personel militer Indonesia gugur dari total sekitar 500.000 personel yang ada, sementara korban dari pihak sipil juga tidak sedikit. Selain itu, serangan Belanda berdampak pada melemahnya kondisi ekonomi Indonesia, terutama karena meningkatnya pengeluaran untuk kebutuhan perang.

Terganggunya stabilitas politik dan pemerintahan RI.

Pada Januari 1948, pasukan di bawah komando Kapten Westerling melakukan pembantaian terhadap penduduk Sulawesi Selatan, menewaskan ribuan warga sipil. Sebelumnya, pada Desember 1947, tragedi serupa terjadi di Desa Rawagede, di mana sebanyak 491 warga sipil dibunuh karena dianggap melindungi Lukas Kustaryo dan pasukannya. Di Jawa Timur, terjadi insiden "kereta api maut," di mana tahanan dimasukkan ke gerbong tertutup tanpa ventilasi, menyebabkan seluruhnya tewas akibat

kekurangan oksigen. Selain itu, wilayah-wilayah perkebunan penting di Indonesia, seperti Sumatera Timur, Palembang, Jawa Barat, dan Jawa Timur, jatuh ke tangan Belanda. Hal ini mengakibatkan kerugian besar secara ekonomi bagi Indonesia, baik akibat biaya perang yang meningkat maupun kehancuran infrastruktur. Tragedi juga melanda dunia militer Indonesia pada 29 Juli 1947, ketika pesawat Dakota yang membawa sumbangan dari Palang Merah Malaya untuk TNI ditembak jatuh oleh Belanda. Insiden ini menewaskan Komodor Muda Udara dr. Abdurahman Saleh, Komodor Muda Udara Mas Agustinus Adisucipto, dan Perwira Muda Udara I Adisumarno Wiryokusumo.

Reaksi internasional terhadap Agresi Militer Belanda I sangat besar, terutama karena dorongan dari India dan Australia, yang mendorong Dewan Keamanan PBB untuk membahas masalah ini pada 30 Juli 1947. Meskipun Dewan Keamanan PBB meminta kedua pihak untuk menghentikan permusuhan, Belanda tetap mengabaikan desakan dunia internasional tersebut. Indonesia juga melaporkan agresi ini ke PBB karena melanggar perjanjian Linggarjati. Belanda berusaha mengklaim hak untuk menentukan masa depan Indonesia, namun sekutu utama Belanda seperti Inggris, Australia, dan Amerika Serikat menolak klaim ini, kecuali Indonesia mengakui terlebih dahulu. Hal ini membuat Belanda terpaksa melanjutkan penaklukan militer.

Sebagai reaksi terhadap tekanan internasional, PBB mulai mengambil langkah untuk menghentikan agresi tersebut, yang dianggap sudah menjadi masalah internasional, bukan sekadar urusan kolonial. Pada 25 Agustus 1947, PBB membentuk Komisi Tiga Negara yang beranggotakan Australia, Belgia, dan Amerika Serikat, untuk menengahi konflik. Indonesia memilih Australia sebagai pihak yang mendukungnya, sementara Belanda memilih Belgia dan AS berperan sebagai pihak netral. Berkat upaya diplomatik Indonesia di luar negeri, dukungan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia semakin meningkat. Pada 15 Agustus 1947, Belanda akhirnya setuju untuk menerima resolusi PBB untuk menghentikan pertempuran. Namun, Belanda kembali melanggar gencatan senjata yang disepakati dan melancarkan agresi militer yang lebih besar, yang dikenal sebagai Agresi Militer Belanda II.

Selepas dari Agresi Militer yang dilakukan oleh Belanda, Indonesia mengalami beberapa kali pergantian kabinet pemerintahan.

Pergantian kabinet dalam sejarah Indonesia menunjukkan dinamika politik yang sangat cepat, terutama pada periode-periode kritis dalam perjalanan negara ini. Pergantian ini mencerminkan berbagai tekanan politik, ekonomi, dan sosial yang mempengaruhi jalannya pemerintahan dan pembentukan identitas nasional Indonesia. Dalam konteks ini, identitas nasional Indonesia dapat dilihat sebagai hasil dari upaya konsolidasi negara dan bangsa di tengah berbagai perubahan politik yang terjadi, termasuk perubahan kabinet yang sering terjadi.

Periode Pasca Kemerdekaan (1945-1949)

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, negara baru ini harus menghadapi berbagai tantangan besar, baik dari luar maupun dalam negeri. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menyatukan berbagai kelompok etnis, agama, dan politik yang ada di dalam negeri dalam sebuah negara bangsa yang merdeka. Di tengah situasi yang penuh ketegangan ini, pergantian kabinet terjadi beberapa kali. Misalnya, Kabinet Presidensial yang dibentuk oleh Soekarno pada 1945 digantikan oleh Kabinet Amir Sjarifuddin pada 1947, dan kemudian Kabinet Hatta pada 1948.

Pada masa ini, negara Indonesia sedang dalam proses mencari bentuk yang tepat untuk pemerintahan dan konsolidasi negara. Pergantian kabinet yang cepat ini menjadi cerminan ketidakstabilan politik, serta upaya penguatan identitas nasional yang masih dalam tahap pencarian. Meskipun terdapat ketegangan politik, terutama antara unsur-unsur politik seperti nasionalis, Islam, dan komunis, semangat nasionalisme yang dibangun oleh para pemimpin revolusi Indonesia mengedepankan konsep "Bhinneka Tunggal Ika" (Unity in Diversity) sebagai bagian dari identitas

nasional. Di sinilah pentingnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mulai diterapkan, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan.

Orde Lama (1949-1966)

Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949, Soekarno mengambil langkah lebih tegas dalam membangun negara yang baru lahir ini. Namun, meskipun Indonesia sudah merdeka secara formal, ketegangan politik dan perbedaan ideologi di dalam negeri tetap tinggi. Pada periode ini, terjadi pergantian kabinet yang relatif sering, mencerminkan ketidakstabilan politik yang terjadi akibat perbedaan pandangan antara kalangan sipil, militer, dan partai politik.

Misalnya, Kabinet Natsir (1950) yang berorientasi pada prinsip-prinsip Islam, digantikan oleh Kabinet Sukiman (1951) yang lebih mendekati diri pada unsur-unsur sosialisme, sementara Kabinet Wilopo (1952) dan Kabinet Burhanuddin Harahap (1955) juga mengikuti dinamika yang berbeda dalam mengatasi permasalahan negara. Pada 1959, Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang membubarkan sistem parlementer dan mengembalikan pemerintahan dengan sistem Presidensial. Kebijakan ini diambil sebagai upaya untuk menstabilkan keadaan politik yang tidak menentu dan memperkuat posisinya sebagai presiden. Pencapaian identitas nasional Indonesia dalam periode ini lebih berfokus pada gagasan tentang "Nasionalisme Indonesia" yang mulai ditegaskan dengan lebih kuat.

Pembentukan identitas nasional Indonesia pada masa ini juga dipengaruhi oleh perjuangan menghadapi ancaman dari luar, baik dari Belanda yang belum sepenuhnya menerima kemerdekaan Indonesia, maupun dari kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan berbeda di dalam negeri. Pada masa Orde Lama ini, Soekarno mengedepankan ideologi Pancasila dan konsep "Nasakom" (Nasionalis, Agama, dan Komunis) sebagai dasar pembentukan negara yang inklusif dan mengakomodasi berbagai kepentingan dalam rangka memperkuat rasa kebangsaan.

Orde Baru (1966-1998)

Periode Orde Baru yang dimulai dengan lengsernya Soekarno dan naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan pada tahun 1966 membawa stabilitas politik yang lebih besar bagi Indonesia. Setelah melalui periode pergantian kabinet yang sangat cepat dan sering pada masa sebelumnya, pada masa Orde Baru Soeharto memimpin dengan kebijakan yang lebih terpusat dan terstruktur. Meskipun pergantian kabinet tidak terlalu sering terjadi pada masa ini, Soeharto tetap mengatur perubahan-perubahan dalam kabinet untuk mengakomodasi kepentingan politik dan ekonomi yang berbeda.

Pada masa Orde Baru, kebijakan pemerintah sangat fokus pada pembangunan ekonomi dan stabilitas sosial-politik. Identitas nasional Indonesia pada masa ini lebih ditekankan pada pembangunan ekonomi yang pesat, penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara, serta kesatuan bangsa yang terbentuk dari semangat gotong royong dan "Pembangunan Nasional." Pemerintah Orde Baru juga memperkenalkan sistem pembangunan yang lebih terstruktur, di mana kebijakan dan peraturan yang ditetapkan pemerintah dijalankan dengan disiplin.

Meskipun pemerintah Orde Baru berhasil membawa stabilitas politik dan pembangunan ekonomi yang signifikan, pemerintahan Soeharto juga menghadapi kritik terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, kurangnya kebebasan politik, dan sentralisasi kekuasaan yang kuat. Namun demikian, kebijakan ini tetap membentuk identitas nasional Indonesia yang lebih terstruktur dan berorientasi pada modernisasi ekonomi.

Reformasi dan Era Pasca-Orde Baru (1998-sekarang)

Setelah Soeharto mengundurkan diri pada tahun 1998, Indonesia memasuki masa Reformasi yang ditandai dengan kebebasan politik yang lebih besar, desentralisasi kekuasaan, serta kebijakan yang lebih terbuka. Pada masa ini, pergantian kabinet kembali terjadi dengan cepat, misalnya Kabinet Reformasi

Pembangunan, Kabinet Gotong Royong, dan Kabinet Indonesia Bersatu yang masing-masing muncul di bawah pemerintahan Presiden Habibie, Presiden Gus Dur, dan Presiden Megawati.

Era Reformasi membawa perubahan besar dalam pembentukan identitas nasional Indonesia. Demokratisasi yang terjadi membuka ruang bagi masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam pemerintahan, sementara kesadaran tentang hak asasi manusia dan pluralisme semakin ditekankan. Identitas nasional Indonesia kini lebih mengedepankan demokrasi, kebebasan berpendapat, dan penghargaan terhadap keragaman budaya, agama, dan etnis yang ada di Indonesia.

Kebijakan desentralisasi juga memberi peluang bagi identitas lokal di berbagai daerah untuk lebih berkembang, meskipun tetap berlandaskan pada semangat kesatuan bangsa. Pembentukan identitas nasional Indonesia di masa ini adalah hasil dari konsolidasi nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan pluralisme yang dihargai dalam kerangka negara kesatuan.

Pembentukan Identitas Nasional melalui Pergantian Kabinet

Pergantian kabinet yang sering kali terjadi dalam sejarah Indonesia, terutama pada masa-masa transisi seperti pasca-kemerdekaan, Orde Lama, dan Orde Baru, mempengaruhi bagaimana Indonesia membangun dan memperkuat identitas nasionalnya. Setiap perubahan kabinet bukan hanya mencerminkan perubahan dalam kebijakan pemerintah, tetapi juga mengindikasikan perubahan dalam orientasi politik dan sosial masyarakat Indonesia.

Pembentukan identitas nasional Indonesia ini dapat dilihat melalui beberapa aspek utama, seperti (1) Pancasila sebagai Ideologi Negara: Pancasila telah menjadi dasar negara Indonesia dan dasar pembentukan identitas nasional sejak masa awal kemerdekaan. Setiap pergantian kabinet di Indonesia selalu melibatkan upaya untuk memperkuat dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (2) Nasionalisme dan Kesatuan Bangsa: Dari periode awal kemerdekaan hingga masa Reformasi, identitas nasional Indonesia selalu ditekankan pada pentingnya kesatuan bangsa dan semangat nasionalisme. Meskipun terdapat berbagai perbedaan, semangat kebersamaan dan saling menghargai antara berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya terus menjadi fondasi utama identitas nasional Indonesia, dan (3) Demokrasi dan Hak Asasi Manusia: Pada masa Reformasi, dengan terbukanya ruang demokrasi, identitas nasional Indonesia semakin ditekankan pada penghargaan terhadap hak asasi manusia, pluralisme, dan kebebasan politik. Proses reformasi ini semakin mengokohkan Indonesia sebagai negara demokratis yang menghargai keragaman dan kebebasan individu.

G30 SPKI

Peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965 merupakan salah satu momen paling dramatis dan menentukan dalam sejarah Indonesia yang tidak hanya mengubah jalannya pemerintahan, tetapi juga memberikan dampak mendalam terhadap pembentukan identitas nasional Indonesia. Kejadian tersebut berakar pada ketegangan politik yang semakin meningkat di Indonesia pada awal 1960-an, terutama antara partai-partai politik yang berkuasa, militer, serta PKI yang pada saat itu memiliki kekuatan yang signifikan dalam politik Indonesia. G30S/PKI merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh sekelompok anggota PKI atau simpatisannya, yang menculik dan membunuh enam jenderal TNI pada malam 30 September 1965. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya mereka untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno, yang dianggap tidak cukup pro-komunis dan tidak mampu menjaga keseimbangan politik yang menguntungkan PKI.

Pada malam itu, sebuah kelompok yang dikenal dengan nama Gerakan 30 September (G30S) berusaha mengambil alih pemerintahan dengan cara yang sangat radikal. Namun, usaha tersebut dengan cepat dipadamkan oleh pihak militer yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto. Setelah peristiwa ini, terjadi kekacauan politik dan sosial yang memicu tindakan represif terhadap mereka yang diduga

terafiliasi dengan PKI, yang berujung pada pembantaian massal di berbagai daerah di Indonesia. PKI, yang sebelumnya menjadi salah satu kekuatan politik terbesar di Indonesia, tiba-tiba dijadikan musuh utama negara dan dihancurkan oleh pemerintah yang dipimpin oleh militer.

Peristiwa G30S/PKI menjadi titik balik yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, menandai berakhirnya era Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dan awal dari Orde Baru di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto. Soeharto, yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), mengambil alih kekuasaan melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang diterbitkan oleh Soekarno pada 11 Maret 1966. Dengan Supersemar, Soeharto diberikan kewenangan untuk menjaga stabilitas negara dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelamatkan negara dari krisis yang ditimbulkan oleh G30S/PKI. Peralihan kekuasaan ini menandai berakhirnya dominasi Soekarno dalam politik Indonesia dan memulai era baru di mana militer memainkan peran yang sangat dominan dalam kehidupan politik negara.

Pascaperistiwa G30S/PKI, Soeharto mengkonsolidasikan kekuasaan dengan menghapuskan pengaruh komunisme dan menstabilkan pemerintahan Indonesia. Dalam proses ini, identitas nasional Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Salah satu aspek utama dari perubahan ini adalah penegasan kembali Pancasila sebagai dasar negara yang harus diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Pancasila, sebagai ideologi negara yang bersifat inklusif, kini diperkenalkan sebagai pengganti ideologi yang lebih pluralistik, seperti yang tercermin dalam kebijakan Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis) yang sebelumnya diusung oleh Soekarno.

Pancasila menjadi identitas nasional yang paling penting dalam pemerintahan Orde Baru, di mana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila—seperti persatuan, musyawarah untuk mufakat, dan kebersamaan—digunakan sebagai dasar untuk menyatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Dalam konteks ini, Pancasila diangkat sebagai benteng untuk menahan ancaman dari ideologi asing, terutama komunisme, yang dianggap berbahaya bagi keberlangsungan negara. Identitas nasional Indonesia, yang semula lebih bersifat inklusif dan pluralistik, kini menjadi lebih homogen dan berorientasi pada nasionalisme yang lebih terpusat pada kesatuan negara.

Identitas nasional Indonesia yang baru ini juga semakin didominasi oleh nilai-nilai militerisme, dengan militer sebagai penjaga utama stabilitas negara. Setelah G30S/PKI, militer di bawah komando Soeharto menjadi kekuatan dominan dalam politik Indonesia. Narasi yang dibangun oleh pemerintah Orde Baru adalah bahwa negara Indonesia hanya dapat tetap utuh dan stabil apabila kekuatan militer menjadi kekuatan utama yang menjaga persatuan bangsa. Militerisme ini menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas nasional yang dibentuk oleh Orde Baru, di mana negara harus dikelola dengan tangan besi untuk mencegah terjadinya ancaman dari dalam, termasuk ancaman ideologi yang dapat memecah belah bangsa. Dalam hal ini, G30S/PKI diposisikan sebagai ancaman besar terhadap negara yang memerlukan respons militer yang tegas dan efektif.

Selain itu, peristiwa G30S/PKI dan dampak yang ditimbulkan memberikan pengaruh besar terhadap pendidikan sejarah di Indonesia. Pada masa Orde Baru, narasi sejarah tentang G30S/PKI dibangun dengan cara yang sangat terkontrol. G30S/PKI digambarkan sebagai pengkhianatan besar yang dilakukan oleh PKI untuk merebut kekuasaan dan menghancurkan negara Indonesia. Dalam versi sejarah resmi yang diajarkan di sekolah-sekolah, PKI dicap sebagai musuh utama negara yang harus dilawan dengan kekuatan militer. Melalui pendekatan ini, pemerintah Orde Baru berupaya membentuk identitas nasional yang menekankan pada kewaspadaan terhadap ideologi komunis dan menonjolkan peran militer sebagai pahlawan yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Pembentukan identitas nasional Indonesia pada masa Orde Baru, yang dipengaruhi oleh peristiwa G30S/PKI, menekankan pada pentingnya stabilitas negara, nasionalisme yang berpusat pada Pancasila,

serta penolakan terhadap ideologi asing yang dianggap dapat merusak kesatuan negara. Dalam hal ini, G30S/PKI berfungsi sebagai sebuah titik referensi untuk memupuk kesadaran nasional yang bersifat monolitik, yang tidak hanya melibatkan ketegangan ideologis, tetapi juga membangun narasi perjuangan yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Di balik upaya tersebut, terbentuklah sebuah identitas nasional yang lebih terstruktur dan lebih terpusat, di mana peran militer dan nilai-nilai Pancasila menjadi simbol utama yang mengikat bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan-tantangan global dan domestik yang ada.

Namun, meskipun Soeharto berhasil membentuk identitas nasional yang lebih stabil dan terpusat, dampak dari peristiwa G30S/PKI dan rezim Orde Baru juga meninggalkan luka sosial yang mendalam. Represi terhadap kelompok-kelompok yang dianggap terafiliasi dengan PKI, serta penghilangan kebebasan politik selama era Orde Baru, memunculkan ketegangan dalam hubungan sosial dan politik di Indonesia yang terus dirasakan bahkan setelah berakhirnya pemerintahan Soeharto pada 1998.

Peristiwa G30S/PKI, dengan segala kompleksitas dan dampaknya, memainkan peran yang sangat besar dalam pembentukan identitas nasional Indonesia. Identitas ini terbentuk melalui penekanan pada kesatuan bangsa yang diperjuangkan melalui ideologi Pancasila, penguatan nasionalisme yang didominasi oleh militerisme, serta upaya untuk menanggulangi ancaman ideologi yang dipandang dapat memecah belah negara. Pembentukan identitas nasional Indonesia setelah G30S/PKI menjadi salah satu proses sejarah yang sangat penting dalam membangun dasar negara yang kokoh di tengah-tengah keragaman etnis, agama, dan budaya yang ada di Indonesia.

Kemudian kita mengacu pada peristiwa Reformasi 1998 menjadi tonggak sejarah penting bagi Indonesia. Lebih dari sekadar pergantian rezim, Reformasi telah memicu transformasi mendalam dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu dampak signifikan dari peristiwa ini adalah pembentukan kembali identitas nasional Indonesia.

Dimana pada peristiwa Reformasi 1998 sangat mempengaruhi pembentukan identitas nasional berupa meningkatkan beberapa hal yaitu, demokrasi sebagai nilai dasar yang dimana Reformasi membawa kembali praktik demokrasi yang lebih terbuka dengan diselenggarakannya pemilihan umum secara langsung dan bebas. Hal ini memperkuat nilai-nilai demokrasi sebagai bagian integral dari identitas nasional. Dan juga kebebasan untuk berekspresi serta berpendapat yang dimana ruang publik menjadi lebih terbuka, memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kritik secara bebas. Kebebasan ini mendorong tumbuhnya kesadaran akan hak-hak asasi manusia. Kemudian pluralisme yang lebih inklusif yang merupakan langkah maju untuk menyatukan perbedaan SARA (suku, ras, agama dan antar-golongan). Reformasi mendorong pengakuan yang lebih besar terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA). Nilai-nilai toleransi dan saling menghormati menjadi lebih dihargai. Serta desentralisasi yang terjadi dengan cara penerapan otonomi daerah di seluruh provinsi yang ada di Indonesia yang dimana otonomi daerah yang diberikan dalam era Reformasi memperkuat identitas lokal dan mendorong pengakuan atas kekayaan budaya Indonesia.

Selanjutnya transparansi dan akuntabilitas yang semakin dikedepankan dan diutamakan karna adanya tuntutan rakyat yang ketika itu rakyat sudah merasa muak dengan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sudah lama terjadi sejak eranya orde baru. Media massa berperan lebih aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah dan mengungkap berbagai kasus korupsi. Hal ini mendorong pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Serta unculnya berbagai organisasi masyarakat sipil

yang kritis terhadap kebijakan pemerintah semakin memperkuat tuntutan akan pemerintahan yang bersih dan baik.

Kemudian pembentukan identitas nasional yang dinamis, yaitu dimana masyarakat bebas untuk berekspresi dan pemerintah memberi ruang masyarakat untuk berpartisipasi dalam membentuk identitas nasional yang lebih relevan dalam perkembangan zaman era globalisasi, modernisasi, dan digitalisasi. Serta Dalam era globalisasi, identitas nasional Indonesia terus berevolusi, beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya yang terjadi, pada zaman ini banyak budaya - budaya asing yang berasal dari luar negara Republik Indonesia yang masuk dengan mudah, yang dimana hal itu menyebabkan adanya muncul beberapa tren terkini yang menjadi kebiasaan atau budaya luar negeri terutama di negara - negara Eropa yang memiliki budaya liberal atau budaya yang cukup bebas tanpa adanya halangan atau aturan dari aspek agama yang dapat masuk ke Indonesia kemudian dapat mempengaruhi ideologi serta budaya yang dari dulu kita lakukan. Hal tersebut tentu berbahaya karena pemuda yang dimana merupakan para calon pemimpin masa depan haruslah mengerti Nusantara dengan berbagai macam serta keunikan ras, suku, serta agama untuk membangun Indonesia ditengah keharmonisan persatuan dan kesatuan.

Peristiwa Reformasi telah menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia. Melalui proses yang panjang dan penuh dinamika, bangsa Indonesia telah berhasil membentuk identitas nasional yang lebih demokratis, pluralis, dan inklusif. Namun, tantangan di masa depan masih banyak, sehingga upaya untuk terus memperkuat identitas nasional harus terus dilakukan.

Kesimpulan

Jurnal ini menekankan bahwa identitas nasional Indonesia dibangun di atas fondasi keberagaman yang bersatu melalui Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pembentukan identitas ini dipengaruhi oleh perjalanan sejarah panjang, nilai-nilai luhur, dan dinamika politik, sosial, serta ekonomi pada berbagai era pemerintahan.

Dimana identitas nasional menjadi lebih inklusif, tantangan globalisasi dan pengaruh perhiditas nasional Indonesia terus berkembang secara dinamis, disesuaikan dengan tantangan zaman. Namun, inti dari identitas ini tetap bertumpu pada Pancasila, nasionalisme, kesatuan, demokrasi, dan penghargaan terhadap keberagaman, yang dijaga melalui pendidikan berbasis nilai-nilai luhur bangsa dan upaya memperkuat kedaulatan di tengah arus globalisasi.

Daftar Pustaka

- Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). (1945). *Dokumen Proklamasi dan Sidang PPKI*.
- Basundoro, Purnawan. (2015). Dinamika politik pasca kemerdekaan di Indonesia. *Jurnal Politik Indonesia*, 9(1).
- Hatta, Mohammad. (1979). *Memoir*. Jakarta: Tintamas.
- Kahin, George McTurnan. (1952). *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Sejarah Peristiwa Rengasdengklok*. Diakses dari <https://kemdikbud.go.id>.
- Nasution, A.B. (2010). Peran Jepang dalam pendidikan dan pelatihan militer di Indonesia. *Jurnal Sejarah Indonesia*, 5(3).

- Ricklefs, M.C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Soekarno. (1963). *Di Bawah Bendera Revolusi*. Jakarta: Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 29 ayat 2, Pasal 31 ayat 3, dan ayat 5.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.